

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Yogyakarta, sangat dikenal oleh masyarakat se-Indonesia sebagai kota pelajar. Selain itu, Yogyakarta juga merupakan tempat dimana terlahirnya sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) terbesar di Indonesia yaitu, MUHAMMADIYAH. Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 Miladiyah, tepatnya disebuah kampung yang bernama "Kauman". Dalam perkembangan sejarahnya hingga saat ini, Muhammadiyah telah banyak berkontribusi dalam membangun Bangsa Indonesia melalui gerakan *tajdid* (pembaharuan) dan *purifikasi* (pemurnian). Terutama dalam hal pendidikan dan politik kebangsaan dari masa ke masa.

Dalam sejarahnya, Muhammadiyah sejak proklamasi sampai dengan 1960 pernah menjadi anggota istimewa partai politik (parpol) Islam Masyumi. Dalam Masyumi itu, Muhammadiyah merupakan sayap modern/reformis, disamping Nahdatul Ulama (NU) yang berperan sebagai sayap tradisonal/pesantren. Setelah Masyumi dibubarkan oleh penguasa Demokrasi Terpimpin, dan kemudian berpindah ke Parmusi yang kalah pada saat Orde Baru, hingga akhirnya setelah Muktamar ke 38 di Ujung Pandang pada tahun

ada, dan memberi kebebasan seluas-luasnya kepada anggotanya untuk memilih parpol yang sesuai dengan hati nuraninya.¹

Hingga akhirnya, Muhammadiyah kembali berperan penting dalam kancah perpolitikan nasional dengan naiknya Dr. H. M. Amien Rais menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode Muktamar ke 43 di Banda Aceh pada bulan Juli 1995. Amien Rais melakukan kritik-kritik korektifnya terhadap penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan Orde Baru yang otoritarian, terutama praktik-praktik Korupsi, Kohusi, dan Nepotisme (KKN), misalnya skandal *Freeport* dan Busang, dan melontarkan ide-ide kreatifnya seperti suksesi kepemimpinan nasional 1998, dialog nasional, *polling* calon presiden, kesiapan menjadi presiden, koalisi bersih dan tobat, yang sangat direspon positif oleh sebagian besar anak bangsa yang mendambakan kehidupan sosial-politik yang lebih baik, lebih demokratis, berkeadilan, dan menjunjung tinggi tegaknya supremasi hukum (*rule of law*) serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).² Hal tersebut dilalui dengan menggunakan strategi *High politics* berbasis teologi-filosofis Tauhid Sosial yang mampu mengambil alih fungsi-fungsi parpol saat itu.

Dari sinilah embrio terlahirnya Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai partai yang akan meneruskan proses reformasi yang telah dipelopori oleh Muhammadiyah-Amien Rais, akan tetapi partai ini tidak memiliki hubungan organisatoris maupun fungsionalis dengan Muhammadiyah seperti ketika Muhammadiyah bergabung dengan Masyumi atau Parmusi. Selain itu, PAN

¹ Suwarno, 2001. Muhammadiyah Sebagai Oposisi, *Studi tentang Perubahan Politik Muhammadiyah Periode 1995-1998*. Yogyakarta: UII Press, hal. xi

² Ibid, hal. xiii

juga merupakan salah satu bentuk dari "ijtihad politik" yang merupakan hasil dari rekomendasi Sidang Tanwir Muhammadiyah tanggal 5-7 Juli 1998 di Semarang kepada PP Muhammadiyah. Dalam lampiran SK PP Muhammadiyah No.42/SK-PP/I-A/1.a/1998 tentang Tanfidz Keputusan Sidang Tanwir tahun 1998, poin "V.HIKMAH" terdapat beberapa poin yang berbunyi:³

1. Sidang Tanwir memandang bahwa gerakan reformasi yang digerakkan oleh Dr. H. M. Amien Rais, yang telah diterima oleh masyarakat luas, adalah sebagai langkah pelaksanaan dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar*, sehingga perlu terus dikembangkan.
2. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat untuk:
 - a. Melakukan ijtihad politik guna mencapai kemaslahatan ummat dan bangsa secara maksimal, yang senantiasa dilandasi semangat dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar*.
 - b. Menyusun agenda reformasi (konsep dan strategi reformasi Muhammadiyah) diberbagai bidang kehidupan dan bernegara menuju makin cepat terwujudnya masyarakat utama yang sejahtera.
3. Guna meningkatkan kinerja Pimpinan Pusat Persyarikatan, khususnya dalam mengimbangi langkah-langkah eksternal Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sidang Tanwir mengamanatkan kepada seluruh pimpinan persyarikatan untuk secara terus menerus melakukan konsolidasi organisasi dengan memantapkan dan melaksanakan secara sungguh-sungguh visi dan misi persyarikatan.

Selanjutnya dalam poin "VII. PERYATAAN-PERNYATAAN" sub-poin "POLITIK" angka 4 berbunyi:⁴

4. Karena kehidupan politik yang demokratis selama Orde Baru dalam kenyataannya masih jauh dari apa yang diharapkan, maka diperlukan partai politik baru yang benar-benar membawa aspirasi reformasi. Khusus kepada kekuatan-kekuatan masyarakat yang berhasrat mendirikan

partai politik dituntut untuk benar-benar mencerminkan persatuan bangsa.

Keputusan Tanwir itulah yang kemudian diterjemahkan oleh warga Muhammadiyah sebagai himbauan untuk mendirikan partai politik, seperti yang diusulkan Amien Rais. Bahkan beliau mengusulkan agar Wakil Ketua PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif untuk menjadi ketua partai yang akan didirikan nantinya (PAN).⁵

Akhirnya pada tahun 1999 PAN mulai mengikuti pemilu yang pertama kalinya dan kembali mengikuti pemilu pada tahun 2004 hingga saat ini, dengan perolehan suara yang cukup besar dan terus mengalami peningkatan, akan tetapi belum mencapai pada tingkat memenangkan pemilu. Baik ditingkat nasional maupun ditingkat lokal propinsi, khususnya PAN di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi obyek penelitian ini.

Adapun perbandingan statistik perolehan suara enam besar pada pemilu 1999 dan pemilu 2004 secara nasional yaitu, sebagai berikut:

TABEL 1.1
REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA SAH PADA PEMILU 1999

No. Urut	Nama Partai Politik	Jumlah Suara	%	Jumlah Kursi
1.	PDIP	36.689.073	33,76	153
2.	GOLKAR	23.741.749	22,46	120
3.	PPP	11.329.905	10,72	58
4.	PKB	13.336.982	12,62	51
5.	PAN	7.528.956	7,12	34
6.	PBB	2.049.708	1,94	13

Sumber: Di olah dari data perolehan suara Pemilu 1999 KPU Pusat.

⁵ Rabbiah. 2007. Muhammadiyah dan Masyarakat Madani; *Peran Politik Muhammadiyah dalam*

TABEL 1.2
REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA SAH PADA PEMILU 2004

No. Urut	Nama Partai Politik	Jumlah Suara	%	Jumlah Kursi
1.	GOLKAR	24.480.757	21,58	128
2.	PDI P	21.026.629	18,53	109
3.	PPP	9.248.764	8,15	58
4.	Demokrat	8.455.225	7,45	57
5.	PKB	11.989.564	10,57	52
6.	PAN	7.303.324	6,44	52

Sumber: Di olah dari data perolehan suara Pemilu 2004 KPU Pusat.

Dari perbandingan perolehan suara PAN pada pemilu 1999 dan 2004 diatas, pada pemilu yang pertama PAN dapat menduduki peringkat lima besar perolehan suara terbanyak setelah PDI P, Golkar, PPP, PKB, dengan perolehan kursi legislatif, yaitu 34 kursi. Sedangkan pada pemilu 2004, PAN memang mengalami penurunan perolehan suara sebesar 225.632 (068 %) suara dengan menduduki peringkat keenam. Akan tetapi PAN mengalami peningkatan perolehan jumlah kursi, dari 34 kursi pada pemilu 1999 menjadi 52 kursi pada pemilu 2004.

Sedangkan perbandingan statistik perolehan suara enam besar pada pemilu 1999 dan 2004 di lokal Provinsi DIY yaitu sebagai berikut:

TABEL 1.3
PEROLEHAN SUARA ENAM BESAR PADA PEMILU 1999

No.	Nama	Yk	Bantul	Sleman	GK	KP	Jumlah	%
1.	PDIP	97.972	148.558	189.527	134.586	72.559	643.202	35,65
2.	PAN	59.108	80.063	100.832	38.152	33.464	311.619	17,27
3.	Golkar	27.438	52.850	61.762	79.797	36.898	258.745	14,34
4.	PKB	11.290	87.364	73.069	43.517	42.000	257.240	14,26
5.	PPP	12.430	25.138	27.601	12.131	10.565	87.865	4,87
6.	PK	4.467	6.290	10.609	2.624	3.818	27.808	1,54

Sumber: Di olah dari data perolehan suara Pemilu 1999 KPUD DIY

TABEL 1.4
PEROLEHAN SUARA LIMA BESAR PADA PEMILU 2004

No.	Nama	Yk	Bantul	Sleman	GK	KP	Jumlah	%
1.	PDIP	59.758	151.336	104.288	99.839	49.840	465.061	26,30
2.	PAN	52.848	80.218	99.216	56.761	39.197	328.240	18,57
3.	Golkar	23.804	37.098	50.610	99.563	34.091	245.166	13,87
4.	PKB	6.539	54.655	47.644	3.136	16.372	183.097	10,36
5.	PKS	24.990	32.362	47.644	16.802	16.372	138.170	7,82

Sumber: Di olah dari data perolehan suara Pemilu 2004 KPUD DIY

Dari kedua tabel perolehan suara PAN pada Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 di DIY, dapat dilihat bahwa terdapat perubahan persentase perolehan suara. Sekalipun urutan kedua masih diduduki oleh PAN, namun persentase perolehan suara PAN mengalami peningkatan, dari 17,27% menjadi 18,57% (meningkat sebanyak 1.3%). Dari satu kota dan empat kabupaten di DIY, PAN mengalami peningkatan suara yang cukup drastis ditiga kabupaten, yaitu

dan kabupaten lainnya mengalami penurunan yang tidak begitu jauh dari angka sebelumnya, yaitu di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

Berdasarkan data perolehan suara PAN pada pemilu 1999 dan pemilu 2004 tersebut, baik ditingkat nasional maupun tingkat lokal di DIY, maka peneliti tertarik untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan suara PAN, khususnya di DIY pada pemilu 2004. Dimana PAN sebagai partai yang baru terlahir pada bulan agustus 1998, kemudian mengikuti pemilu 1999 dapat menduduki peringkat lima besar dengan perolehan 34 kursi di legislatif dan pemilu 2004 dapat menduduki peringkat enam besar dengan perolehan 52 kursi di legislatif. Sedangkan pada tingkat lokal di DIY, PAN dapat menduduki peringkat dua setelah PDI P, dan selalu mengalami peningkatan perolehan suara dari pemilu 1999 dengan perolehan suara, yaitu 311.619 (17,27 %) suara, dan pada pemilu 2004 memperoleh suara, yaitu 328.240 (18,57 %) suara, meningkat sebesar 16.621 (1,3%) suara.

Selain itu peneliti melihat dari segi kelahiran PAN itu sendiri, yang tidak terlepas dari peran Muhammadiyah yang cukup besar dalam melahirkan partai tersebut, bahkan ikut mensukseskan PAN pada pemilu 1999 dan 2004. DIY sebagai tempat kelahiran Muhammadiyah yang sebagian besar masyarakatnya adalah warga Muhammadiyah, tentunya juga akan menjadi basis massa PAN baik ditingkat nasional maupun lokal di DIY. Melalui penelitian ini, peneliti ingin membuktikan hal tersebut, apakah sejarah kelahiran PAN yang tidak terlepas dari peran Muhammadiyah, turut menjadi

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diatas, penelitian ini perlu dipertegas rumusan masalahnya, yaitu: Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perolehan suara Partai Amanat Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta pada pemilu pemilu 2004?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan: "Ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan suara Partai Amanat Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta pada pemilu 2004".

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis

Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang partai politik, khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan suara PAN di Daerah Istimewa Yogyakarta pada pemilu 2004 kemarin.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan pemahaman pada PAN, akan pentingnya mengevaluasi diri dengan menganalisis faktor-faktor mempengaruhi perolehan suara ketika pemilu 2004. Sehingga dapat menjadi bahan acuan

... ..

D. Kerangka Dasar Teori

1. Pemilihan Umum

Dalam ilmu politik dikenal dua macam pemahaman tentang demokrasi. *Pertama*, pemahaman demokrasi secara normatif. *Kedua*, pemaham demokrasi secara empirik. Dalam pemahaman normatif, demokrasi merupakan suatu kondisi yang secara ideal ingin diselenggarakan oleh suatu negara. Sedangkan dalam pemahaman empirik, demokrasi dikaitkan dengan kenyataan penerapan demokrasi dalam tataran kehidupan politik praktis⁶. Indonesia, dalam pemahaman normatif, mencantumkan keinginannya untuk menjalankan sistem demokrasi dalam UUD 1945. Namun yang menarik untuk diamati adalah bahwa pemahaman demokrasi secara normatif tersebut belum tentu terwujud secara empirik dalam kehidupan politik.

Untuk melihat apakah demokrasi yang normatif diterapkan dengan baik dalam kehidupan politik secara empirik, para ahli politik membuat berbagai indikator untuk mengukurnya. Antara lain Huntington yang mendefinisikan demokrasi sebagai suatu sistem politik dimana para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat didalam sistem politik, para calon secara bebas bersaing untuk mendapatkan suara, dan hampir semua penduduk dewasa berhak untuk memberikan suaranya. Selain itu, demokrasi juga mensyaratkan adanya kebebasan sipil dan politik, yaitu adanya kebebasan untuk berbicara, berpendapat, berkumpul, berorganisasi,

yang dibutuhkan untuk perdebatan politik, dan pelaksanaan kampanye pemilihan umum. Suatu sistem dikatakan tidak demokratis bila oposisi dikontrol dan dihalangi dalam mencapai apa yang dapat dilakukan seperti koran-koran oposisi dibredel, hasil pemungutan suara dimanipulasi atau perhitungan suara tidak benar⁷.

Sedangkan Dahl mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah sistem politik dimana para anggotanya saling memandang antara yang satu dengan yang lainnya sebagai orang-orang yang sama dalam segi politik secara bersama-sama berdaulat, memiliki kemampuan, sumber daya, dan lembaga-lembaga yang mereka perlukan untuk memerintah diri mereka sendiri. Indikator demokrasi yang diajukan Dahl adalah sebagai berikut:

1. Adanya kontrol terhadap kebijakan pemerintah.
2. Adanya pemilihan umum yang diadakan secara damai dalam jangka waktu tertentu, terbuka, dan bebas.
3. Semua orang dewasa mempunyai hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum.
4. Hampir semua orang dewasa mempunyai hak untuk mencalonkan diri sebagai kandidat dalam pemilihan umum.
5. Setiap warga negara memiliki hak politik, seperti kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat, termasuk didalamnya mengkritik pemerintah.

⁷ Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1995, hal. 5.

⁸ ...

6. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan akses informasi alternatif yang tidak dimonopoli oleh pemerintah atau kelompok tunggal lain.
7. Setiap warga negara berhak untuk membentuk dan bergabung dengan lembaga-lembaga otonom, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan yang berusaha untuk mempengaruhi pemerintah dengan mengikuti pemilihan umum dan dengan perangkat-perangkat lainnya.

Melihat pendapat Huntington maupun Dahl tersebut, maka jelas bahwa adanya pemilihan umum yang dilaksanakan secara damai dalam jangka waktu tertentu, terbuka, bebas dan partai-partai politik yang eksis sebagai peserta pemilu merupakan indikator demokrasi dalam kehidupan suatu sistem politik.

Pelaksanaan Pemilu 2004 didasarkan pada UU no. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana disebutkan:

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. (pasal 1)

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (pasal 2)

Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali pada hari libur atau hari yang diliburkan. (pasal 3)

Dari pasal-pasal tersebut bisa dilihat upaya konstitusional untuk

Dahl. Setidaknya, meminjam istilah Afan Gaffar, undang-undang tersebut mencerminkan pemilu yang ingin diwujudkan pada tataran empirik dari aspek pemahaman demokrasi secara normatif.

Supaya pemilu bisa berjalan secara damai, terbuka, dan bebas, sudah barang tentu diperlukan sebuah sistem pemilu yang disepakati bersama. Sistem pemilu dalam ilmu politik dipahami sebagai suatu kumpulan metode atau cara warga masyarakat memilih para wakil mereka, baik yang berada dilembaga legislatif (DPD, DPR, DPRD) ataupun jabatan politik eksekutif (Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota).

Sistem pemilihan merupakan mekanisme untuk menentukan komposisi dalam jabatan politik atau jabatan pemerintahan. Sistem pemilihan menyediakan sarana utama bagi partisipasi politik para individu yang hidup dalam masyarakat yang luas, kompleks, dan modern. Banyak sarjana berpendapat bahwa sistem pemilihan merupakan suatu ciri tegas sebuah sistem demokrasi⁹.

Menurut Afan Gaffar¹⁰, untuk menentukan sistem pemilu yang tepat bagi sebuah negara atau masyarakat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. *Electoral formula* (sistem pemilu). Electoral formula ini akan menentukan alokasi kursi yang diberikan pada masing-masing partai

yang bersaing. Dalam Ilmu Politik secara umum dikenal dua jenis sistem pemilihan, yaitu:

a. Sistem Distrik/Sistem Pluralistik (*single-member constituency*)

Sistem ini merupakan sistem yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis yang lazim disebut distrik. Setiap distrik, mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat.

b. Sistem Representasi Proporsional (*multi-member constituency*)

Gagasan pokok dalam sistem ini adalah bahwa jumlah kursi yang diperoleh suatu partai sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya.

2. *Distric magnitude* (besaran kursi dalam distrik). *Distric magnitude* menentukan jumlah wakil rakyat yang dipilih disetiap distrik. Besaran distrik bisa berbeda-beda tergantung pada kepadatan penduduknya. Semakin besar *magnitude* sebuah distrik, makin besar partai-partai kecil terlindungi.
3. *Electoral threshold*, yaitu jumlah dukungan minimal yang harus diperoleh partai untuk mendapatkan kursi dilembaga perwakilan.

Dalam UU no.12 tahun 2003 disebutkan bahwa pada Pemilu 2004 digunakan sistem pemilu proporsional untuk memilih anggota DPR dan DPRD, sedangkan untuk memilih anggota DPD digunakan sistem distrik.

Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Pemilu untuk memilih anggota DPRD dilaksanakan dengan sistem distrik kecuali kabupaten/kota

2. Partai Politik

Keberadaan dan pengakuan terhadap partai-partai politik sebagai peserta pemilu merupakan salah satu indikator adanya proses demokrasi yang sehat dalam sebuah tatanan sistem politik. Melalui pemilu, partai-partai politik berusaha mendapatkan dukungan suara rakyat untuk dapat mendudukkan kader-kadernya dalam jabatan pemerintahan, sehingga partai politik tersebut dapat menjalankan programnya atau secara signifikan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan yang ada.

Selain itu, kehadiran partai politik memiliki peran yang penting karena berkaitan dengan fungsi-fungsi yang dijalankannya dalam sistem politik. Fungsi-fungsi itu bisa diidentifikasi sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan, rekrutmen politik, komunikasi politik, sosialisasi politik, pengatur konflik, dan pembuat kebijakan¹¹.

Menurut Carl J. Friedrich: "Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materil" (*A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with*

¹¹ Haryanto, *Sistem Politik: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 89-96. Lihat juga dalam Miriam Budiadrjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm: 163-165. Miriam menyebutkan 4 fungsi utama yang dijalankan oleh Partai Politik, yaitu: sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen

praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan”¹⁵

Berdasarkan beberapa definisi mengenai partai politik diatas, maka secara umum partai politik dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan atau mendudukan anggota-anggotanya dalam jabatan pemerintahan.¹⁶ Dalam UU no.31 tahun 2002 tentang Partai Politik pasal 1 disebutkan bahwa:

Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.

Maurice Duverger adalah salah satu ilmuwan politik yang mencoba membuat klasifikasi partai politik dan hingga saat ini masih digunakan oleh kalangan ilmuwan politik. Berdasarkan persaingan antar partai yang terjadi dalam sebuah sistem politik, maka klasifikasi partai politik, yang kemudian disebut dengan sistem kepartaian, dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: sistem satu partai, sistem dua partai, dan sistem multi partai.¹⁷

Sebagai suatu organisasi, parpol secara ideal dimaksudkan untuk memobilisasi dan mengaktifkan rakyat, mengatur perbedaan pendapat yang saling bersilang, mewakili kepentingan tertentu, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah dan damai. Peran partai

¹⁵. Mark N. Hagopian, *“Regimes, Movements, and Ideologies”*. New York and London Longman, 1978.

¹⁶ Huszar dan Stevenson dalam Haryanto, *ibid.*, hlm. 87.

¹⁷ ...

politik didalam negara demokrasi sangat vital karena lembaga inilah yang nantinya melakukan fungsi-fungsi kontrol terhadap pemerintahan melalui wakil-wakilnya yang duduk dilembaga legislatif. Partai politik juga berfungsi melakukan pendidikan politik kepada warga negara supaya dapat ambil bagian dalam kehidupan berdemokrasi.

Partai politik mempunyai cita-cita, tujuan dan aktivitas yang berbeda dari elemen demokrasi lainnya seperti Kelompok Kepentingan (*interest group*) atau Kelompok Penekan (*pressure group*). Partai politik memiliki visi dan misi yang lebih luas. Jika Kelompok Kepentingan hanya berjuang untuk mempengaruhi pembuat kebijakan agar supaya terhindar dari peraturan-peraturan yang merugikan kepentingannya atau supaya diuntungkan dari produk hukum tertentu, maka partai politik lebih mewakili kepentingan dari mayoritas konstituen yang diwakilinya. Kelompok kepentingan juga tidak berusaha menempatkan wakil-wakilnya untuk duduk dikursi wakil rakyat, ia hanya cukup berusaha mempengaruhi satu atau dua pembuat kebijakan entah anggota legislatif atau menteri dalam kabinet. Di lihat dari beberapa indikator diatas maka jelaslah bahwa partai politik mempunyai orientasi yang lebih visioner karena mewakili banyak golongan masyarakat.

Tujuan partai politik ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan (biasanya dengan cara-cara konstitusionil) untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.¹⁸

¹⁸ Prof. Miciam Budiarjo, *Op.Cit.* hal 160-161

Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan partisipasi politik. Partisipasi politik melalui mana seseorang secara sukarela aktif dalam pemilihan pemimpin-pemimpin politik serta ikut serta dalam mempengaruhi kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu semua bisa dilakukan melalui menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum, menyampaikan saran-saran politik melalui partai dimana ia bernaung, duduk dilembaga legislatif, mengikuti diskusi-diskusi politik dan lain sebagainya.

Dalam negara-negara yang menganut demokrasi sebagai sistem pemerintahannya partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi :¹⁹

1. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik

Salah satu tugas dari partai politik yaitu menyalurkan segala aspirasi yang berkembang di masyarakat supaya tidak terjadi kesimpangsiuran. Segala masukan dan aspirasi ini kemudian ditampung untuk kemudian diteruskan menjadi sebuah saran kebijakan melalui wakil-wakil partai tersebut yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif.

Partai juga berusaha untuk melakukan sosialisasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap masyarakat luas terutama konstituennya (dalam hal ini partai sering disebut sebagai *broker*). Dengan fungsi tersebut maka partai politik melakukan komunikasi politik melalui dua arah yaitu dari atas melalui penyukseskan

kebijakan-kebijakan pemerintah, juga dari bawah dengan cara menyampaikan saran dan tuntutan dari masyarakat melalui wakil-wakilnya yang ada di lembaga tinggi negara.

2. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik

Kedudukan partai sebagai organisasi yang melaksanakan sosialisasi politik berarti partai dalam setiap kegiatannya baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan suatu perspektif, sikap dan orientasi kepada masyarakat dalam melihat fenomena politik. Proses ini berlangsung secara terus menerus dari masa kanak-kanak sampai orang itu dewasa. Fungsi ini dilakukan melalui kampanye-kampanye dan diskusi-diskusi politik suatu partai dalam usahanya memenangkan pemilu. Melalui ini partai menanamkan *image* yang positif kepada calon pendukungnya, sekaligus memberikan pandangan dan sikap kepada mereka dalam menilai isu-isu politik.

3. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik

Ini dimaksudkan bahwa partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*). Caranya yaitu dengan persuasi, kontak pribadi, *open recruitment*, dan lain sebagainya. Dengan demikian partai telah turut serta memperluas partisipasi politik dan mengikis diskriminasi politik. Melalui sarana rekrutmen politik juga partai bertanggungjawab dalam menjamin sirkulasi kepemimpinan politik di suatu negara karena diherankan

dalam jangka panjang partai melakukan *follow up* dengan melakukan kaderisasi anggota-anggotanya supaya meneruskan tongkat estafet kepemimpinan politik dimasa mendatang.

4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik

Dalam suasana demokrasi dimana perbedaan pendapat di masyarakat rentan memunculkan konflik maka partai politik melakukan fungsinya dalam mengatur konflik tersebut supaya tidak menimbulkan eksese negatif. Partai dituntut untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi. Namun dalam perkembangannya justru partai politiklah yang kerap membuat konflik itu sendiri demi kepentingan pragmatis.

Sebagai agen demokrasi, partai politik mempunyai tugas yang tidak ringan. Selain bertujuan untuk memperoleh kekuasaan melalui pemilihan umum partai politik juga berperan dalam melakukan pendidikan politik bagi publik, melakukan sosialisasi politik, dan juga melaksanakan kaderisasi pemimpin politik melalui proses rekrutmen yang mereka jalankan. Semua tanggung jawab ini penting guna menjamin terselenggaranya proses demokratisasi politik yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Di dalam sebuah negara demokrasi dimana proses pergantian pemimpin dilakukan secara demokratis melalui penyelenggaraan pemilihan umum, peranan partai politik dalam menjalankan fungsi

seleksi politik sangat vital. Fungsi ini dilakukan melalui rekrutmen

terhadap individu-individu yang mempunyai bakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik. Rekrutmen digunakan dalam pengertian yang seluas mungkin untuk menunjukkan latihan (*training*) dan persiapan untuk kepemimpinan.

Sistem satu partai (*single party system*) digunakan untuk partai yang hanya ada satu-satunya dalam sebuah negara ataupun satu partai yang sangat dominan kedudukannya diantara partai-partai lain. Sistem dua partai (*two party system*) digunakan untuk menyebut sistem kepartaian disuatu Negara, dimana hanya ada dua partai atau dua partai dominan yang berkedudukan sebagai partai berkuasa dan partai oposisi diantara partai-partai lain. Sistem multi partai (*multy party system*) dimana banyak terdapat partai politik yang kedudukannya hampir berimbang atau tidak ada partai yang kedudukannya mendominasi partai-partai lain. Apabila dikaitkan dengan sistem pemilu, pada negara yang memiliki sistem dua partai biasanya dikaitkan dengan pemilu sistem distrik, sedangkan pada negara yang memiliki sistem multi partai biasanya dikaitkan dengan pemilu sistem perwakilan berimbang.

Pasca reformasi 1998 sistem kepartaian Indonesia bisa diklasifikasikan dalam sistem multi partai. Partai-partai politik kembali bermunculan, setelah sebelumnya kehidupan sistem kepartaian didominasi oleh Golongan Karya dan bisa diklasifikasikan dalam sistem partai tunggal. Pada Pemilu 1999 tercatat ada empat puluh delapan partai politik yang mengikuti pemilu dan pada Pemilu 2004 terdapat dua puluh empat partai

politik peserta pemilu. Sistem pemilu yang digunakan adalah sistem perwakilan berimbang.

Dengan munculnya banyak partai tanpa adanya satu atau dua partai yang mendominasi secara mayoritas, maka persaingan untuk mendapatkan kursi dan mendudukkan kadernya dalam jabatan pemerintahan menjadi semakin ketat. Oleh karena itu, penting bagi partai politik untuk melakukan pengelolaan kegiatan kampanye secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perolehan Suara Partai Politik dalam Pemilu

Begitu banyak faktor yang dapat mempengaruhi perolehan suara suatu partai politik dalam pemilu, salah satu diantaranya yaitu, perilaku pemilih. Akan tetapi ada sekelompok orang yang terkadang memilih karena partai atau kandidat tertentu dianggap representatif dari kelas sosialnya dan ada juga suatu kelompok yang memilih sebagai ekspresi dari sikap loyal pada partai atau figure tokoh tertentu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan politik sangat diperlukan dalam menyusun strategi *marketing*. Informasi mengenai faktor-faktor tersebut dapat berguna untuk menyusun strategi komunikasi, manajemen kandidat, dan penyusunan isu dan kebijakan yang akan ditawarkan kepada para pemilih.

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan politik seseorang,

yang terpenting dan sangat berpengaruh pada perolehan suara partai

dalam pemilu adalah perilaku politik masyarakat sebagai peserta pemilu. Efektifitas dan efisiensi penyampaian pesan politik – apa dan dengan cara bagaimana pesan disampaikan – ditentukan oleh pemahaman perilaku politik. Siapa, kapan, dan bagaimana seorang kandidat tampil agar dapat menarik massa, juga ditentukan perilaku pemilih. Pendek kata, perilaku pemilih menjadi informasi penting yang sangat berguna dalam merencanakan kampanye dan alokasi sumberdaya yang dimiliki seorang kandidat atau sebuah partai.

Berikut ada beberapa pendekatan untuk melihat perilaku pemilih;²⁰

1. Pendekatan Sosiologis (Mazhab Columbia)

Pendekatan sosiologis berasal dari Eropa, kemudian dikembangkan oleh para sosiolog Amerika Serikat di Universitas Columbia. Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial, seperti usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang keluarga, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal, dan lainnya, memberi pengaruh cukup signifikan terhadap pembentukan perilaku pemilih. Kelompok-kelompok sosial itu memiliki peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi, dan orientasi seseorang.

Menurut Bone & Renney (1981), ada tiga tipe utama pengelompokan sosial;²¹

a. *Kelompok Kategorial*; Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang memiliki satu atau beberapa karakter khas, tetapi tidak mengorganisasikan aktivitas politik dan tidak menyadari identifikasi dan tujuan kelompoknya. Setiap kelompok memiliki karakteristik politik yang berbeda. Secara umum, perbedaan perilaku politik setiap kategori terjadi karena masing-masing kategori memberi reaksi yang berbeda terhadap berbagai faktor berikut;

- 1) Perbedaan jenis kelamin
- 2) Perbedaan usia, dan
- 3) Perbedaan pendidikan

b. *Kelompok Sekunder*; Kelompok sekunder memiliki pengaruh yang lebih besar dari pada kelompok kategorial. Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang memiliki ciri yang sama yang menyadari tujuan dan identifikasi kelompoknya, dan bahkan sebagian membentuk organisasi untuk memajukan kepentingan kelompoknya.

Ada empat faktor psikologis yang memiliki kekuatan pengaruh kelompok sekunder kepada para anggotanya, yaitu;

- 1) Kuat-lemahnya identifikasi individual terhadap kelompok
- 2) Berkaitan dengan lamanya seseorang menjadi anggota kelompok

3) Berapanya politik bagi para pemimpin suatu kelompok

4) Tingkat kepentingan politik bagi anggota-anggota individual.

Adapun Kelompok-kelompok sekunder dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

- 1) Pekerjaan
- 2) Status sosio ekonomi dan kelas sosial
- 3) Kelompok-kelompok etnis yang meliputi ras, agama, dan daerah asal.

c. *Kelompok Primer*; Kelompok primer memiliki pengaruh yang paling kuat dan langsung terhadap perilaku politik seseorang, khususnya dari keluarga dan teman-teman dekat. Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang sering dan secara teratur melakukan kontak dan interaksi secara langsung.

Adapun mereka yang termasuk dalam kelompok primer adalah:

- 1) Pasangan-pasangan suami-isteri
- 2) Orang tua dan anak-anak
- 3) Kelompok bermain (*peer groups*).

2. Pendekatan Psikologis (Mazhab Michigan)

Pendekatan ini dipelopori oleh August Campbell, peneliti pada *Survey Research Center*, sebuah lembaga penelitian di Universitas Michigan, kemudian dikembangkan di Amerika Serikat. Pendekatan ini menggarisbawahi adanya sikap politik para pemberi suara yang menetap. Teori ini dilandasi oleh konsep *sikap dan sosialisasi*

Sikap seseorang sangat mempengaruhi perilaku politiknya. Sikap itu terbentuk melalui sosialisasi yang berlangsung lama, bahkan bisa jadi sejak seorang calon pemilih masih berusia dini. Pada usia dini, seorang calon pemilih telah menerima "pengaruh" politik dari orang tuanya, baik dari komunikasi langsung maupun dari pandangan politik yang diekspresikan oleh orang tuanya. Sikap tersebut menjadi lebih mantap ketika menghadapi pengaruh berbagai kelompok acuan seperti pekerjaan, kelompok pengajian, dan sebagainya. Proses panjang sosialisasi itu kemudian membentuk ikatan yang kuat dengan partai politik atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Ikatan inilah yang disebut sebagai *identifikasi partai*, sebuah variabel inti untuk menjelaskan pemilih berdasarkan Mazhab Michigan.

Kuatnya pengaruh identifikasi terhadap perilaku pemilih berkaitan dengan fungsi *sikap*. Menurut Greenstein, *sikap* memiliki tiga fungsi;²²

- a. Fungsi kepentingan, bahwa penilaian terhadap suatu obyek diberikan berdasarkan motivasi, minat, dan kepentingan orang tersebut.
- b. Fungsi penyesuaian diri, bahwa seseorang bersikap tertentu sesuai dengan keinginan orang itu untuk sama atau tidak sama dengan tokoh yang disegani atau kelompok panutannya.

²² Ibid, hlm. 60.

- c. Fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri, bahwa upaya untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis, yang mungkin berwujud mekanisme pertahanan dan eksternalisasi diri seperti proyeksi, idealisasi, rasionalisasi, dan identifikasi.

Berdasarkan konsep tindakan komunikasi (Dan Nimmo, 1989), para pemilih yang dipengaruhi oleh faktor identifikasi partai ini digolongkan sebagai *pemberi suara yang aktif*. Konsep Nimmo ini juga mengaitkan pendekatan sosiologis dengan pendekatan psikologis. Bagi Nimmo, identifikasi partai berkaitan dengan pengelompokan sosial.

Asumsi utama Nimmo adalah bahwa manusia beraksi terhadap rangsangan secara pasif dan terkondisi. Perilaku pemberi suara dibentuk oleh faktor-faktor jangka panjang, terutama faktor sosial. Pengelompokan sosial dan demografi berkorelasi dengan proses identifikasi partai. Ini tak lain karena karakter kelompok sosial dan demografi di mana pemilih itu berada, memberi pengaruh sangat penting dalam proses pembentukan ikatan emosional pemilih dengan simbol-simbol partai, terutama pada awal proses sosialisasi.

3. Pendekatan Rasional

Prilaku pemilih dapat berubah kapan saja, dalam artian bahwa prilaku pemilih tidak hanya ditentukan oleh faktor karakteristik sosial dan identifikasi partai saja. Sebagai bukti, kita dapat melihat prilaku pemilih di Inggris yang menunjukkan adanya nalang untuk

mempengaruhi pemilih diluar "jalur" karakteristik sosial dan identifikasi. Kavanagh mengemukakan, perilaku pemilih Inggris lebih sulit diprediksi karena tiga alasan;²³

- a. Menurunnya jumlah orang yang mengidentifikasi diri mereka secara kuat dengan partai-partai.
- b. Loyalis kelas melemah, dan kelas pekerja berkurang jumlahnya.
- c. Terjadi perubahan sosial, yang antara lain ditandai dengan perubahan pekerjaan dan pemukiman.

Dengan tiga faktor tersebut, dukungan para pemilih kepada partai-partai bersifat 'mudah menguap' (volatil). Survei jejak pendapat membuktikan, *rating* dukungan kepada suatu partai pada awal pekan kampanye bisa berubah secara signifikan pada akhir pekan. Ini mengindikasikan kampanye memberikan andil dalam perilaku pemilih. *Pilihan isu* yang merupakan "mainan" utama juru kampanye tak bisa diabaikan.

Hanya saja, pilihan isu politik tidak serta merta menjadi daya pikat kuat dan satu-satunya faktor yang mustahak. Satu dan lain hal ialah karena adanya skeptisisme tentang kemampuan para kandidat untuk menghela dan mewujudkan isu dalam agenda pemerintahan bila kelak terpilih. Walaupun "nasone" kandidat juga menjadi faktor penting

Penelitian Pomper pada pemilu 1946, 1964, dan 1972 (dalam Asfar, 1993) menghasilkan kesimpulan yang mirip dengan catatan Kavanagh tentang perilaku pemilih di Inggris.²⁴

- a. Hubungan antara variabel-variabel sosial-ekonomi dengan pilihan pemilih semakin melemah dari pemilu ke pemilu, dan sampai tingkat yang rendah pada tahun 1972. Faktor-faktor demografis ketika dihubungkan dengan pilihan pemilih juga mengalami hal yang sama.
- b. Posisi isu-isu politik dalam menentukan perilaku politik meningkat secara tajam, baik dampaknya secara langsung terhadap pilihan pemilih maupun secara tidak langsung melalui penilaian calon kandidat.
- c. Terjadi penurunan pengaruh identifikasi partai terhadap pilihan pemilih secara terus-menerus mulai dari pemilu 1956, 1964, dan puncaknya pada pemilu 1972.

Hasil penelitian di Inggris dan Amerika Serikat itu mengantarkan kita ke pendekatan rasional untuk melengkapi pendekatan sosiologis dan psikologis. Pendekatan rasional terutama berkaitan dengan orientasi utama pemilih, yakni *orientasi isu* dan *orientasi kandidat*. Perilaku pemilih berorientasi isu berpusat pada pertanyaan: apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dari partai yang berbeda-beda dalam memecahkan persoalan-persoalan yang

sedang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara orientasi kandidat tanpa mempedulikan label partai.

Adapun ciri-ciri pemberi suara yang rasional itu meliputi lima hal:

- a. Dapat mengambil keputusan bila dihadapkan pada alternatif
- b. Dapat membandingkan apakah sebuah alternatif lebih disukai, sama saja, atau lebih rendah dibandingkan dengan alternatif lain
- c. Menyusun alternatif dengan cara transitif: jika A lebih disukai daripada B, dan B lebih baik daripada C, maka A lebih disukai daripada C
- d. Memilih alternatif yang tingkat preferensinya lebih tinggi
- e. Selalu mengambil keputusan yang sama bila dihadapkan pada alternatif-alternatif yang sama.

Konsep Nimmo mengenai pemberi suara responsif, agaknya dapat menjelaskan perbedaan antara pendekatan rasional dengan pendekatan sosiologi dan psikologis. Bahwa perilaku pemberi suara yang responsif tidak permanen, tetapi berubah-ubah seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan peristiwa politik. Dengan demikian, para pemilih sangat dikondisikan oleh berbagai rangsangan luar. Apa yang mereka pilih pada hari pemilihan ditentukan oleh rangsangan yang diberikan oleh pemimpin politik, partai, dan kandidat

Karakter pemberi suara responsif adalah sebagai berikut:

- a. Walaupun dipengaruhi karakteristik sosial dan demografis, tapi pengaruhnya tidak deterministik.
 - b. Pemberi suara responsif memiliki kesetiaan kepada partai, tetapi afiliasi ini tidak menentukan perilaku pilihan.
 - c. Pemberi suara yang responsif lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor jangka pendek yang penting dalam suatu pemilihan umum tertentu ketimbang kesetiaan jangka panjang kepada kelompok atau kepada partai yang lebih penting daripada semua pemilihan umum.
4. Pendekatan Domain Kognitif (Pendekatan Marketing).

Newman & Sheth (1985) mengembangkan model perilaku pemilih berdasarkan beberapa domain yang terkait dengan *marketing*. Dalam mengembangkan model tersebut, mereka menggunakan sejumlah kepercayaan kognitif yang berasal dari berbagai sumber seperti pemilih, komunikasi dari mulut ke mulut, dan media massa. Model ini dikembangkan untuk menerangkan dan memprediksikan perilaku pemilih.

Menurut model ini, perilaku pemilih ditentukan oleh tujuh domain kognitif yang berbeda dan terpisah, sebagai berikut:

- a. Isu dan kebijakan politik (*issue and policies*); merepresentasikan kebijakan atau program yang diperjuangkan dan dijanjikan oleh partai atau kandidat politik jika kelak menang pemilu. Inilah platform dasar yang ditawarkan oleh kontestan Pemilu kepada para

pemilih. Yang termasuk dalam komponen ini adalah kebijakan ekonomi, kebijakan luar negeri, kebijakan dalam negeri, kebijakan sosial, kebijakan politik dan keamanan, kebijakan hukum, dan karakteristik kepemimpinan.

b. Citra sosial (*social imagery*); menunjukkan stereotip kandidat atau partai untuk menarik pemilih dengan menciptakan asosiasi antara kandidat atau partai dengan segmen-segmen tertentu dalam masyarakat. *Social imagery* adalah citra kandidat dalam pikiran pemilih mengenai "berada" di dalam kelompok sosial mana atau tergolong sebagai apa sebuah partai atau kandidat politik. *Social imagery* dapat terjadi berdasarkan banyak faktor, antara lain:

1) Demografi:

- Usia (contoh: *partai orang muda*)
- Gender (contoh: *calon pemimpin bangsa dari kaum hawa*)
- Agama (contoh: *partai orang Islam, partai orang Katolik*)

2) Sosio ekonomi:

- Pekerjaan (contoh: *partai kaum buruh*)
- Pendapatan (contoh: *partai wong cilik*)

3) Kultural dan etnik:

- Kultural (contoh: *kandidat presiden yang seniman*)
- Etnik (contoh: *partai orang jawa*)

4) Politis-ideologi (contoh: *partai nasionalis, partai agamis, partai konservatif, partai moderat*).

- c. Perasaan emosional (*emotional feeling*); dimensi emosional yang terpancar dari sebuah kontestan atau kandidat yang ditunjukkan oleh *policy* politik yang ditawarkan.
- d. Citra kandidat (*candidate personality*); mengacu pada sifat-sifat pribadi yang penting yang dianggap sebagai karakter kandidat. Pada Pemilu Amerika tahun 1980, misalnya, Reagan memiliki citra sebagai "pemimpin yang kuat", sementara John Glen pada tahun 1984 mencoba mengembangkan citra sebagai "seorang pahlawan". Beberapa sifat yang juga merupakan *candidate personality* adalah artikulatif, welas-asih, stabil, energik, jujur, tegar, dan sebagainya.
- e. Peristiwa mutakhir (*current events*); mengacu pada himpunan peristiwa, isu, dan kebijakan yang berkembang menjelang dan selama kampanye. Secara umum, *current events* dapat dibagi menjadi masalah domestik dan luar negeri. Yang termasuk dalam masalah domestik misalnya adalah tingkat inflasi, prediksi ekonomi, gerakan sparatis, ancaman keamanan, merajalelanya korupsi, dan sebagainya. Sedangkan masalah luar negeri misalnya perang antara negara-negara tetangga, invasi sebuah negara ke negara lainnya, dan contoh lainnya yang mempunyai pengaruh baik langsung maupun tidak langsung kepada para pemilih.
- f. Peristiwa pribadi (*personal events*); mengacu pada kehidupan pribadi dan peristiwa yang pernah dialami secara pribadi oleh seorang kandidat misalnya skandal seksual, skandal bisnis, menjadi

korban rezim tertentu, menjadi tokoh pada perjuangan tertentu, ikut berperang untuk mempertahankan tanah, dan sebagainya.

- g. Faktor-faktor epistemik (*epistemic issues*); isu-isu pemilihan yang spesifik yang dapat memicu keingintahuan para pemilih mengenai hal-hal baru. Carter pada pemilihan Presiden Amerika tahun 1976 berhasil menunjukkan dirinya sebagai "wajah segar" pada dunia politik. Pada Pemilu Amerika tahun 1992, Ross Perot sempat muncul sebagai pesaing George Bush dan Bill Clinton. Bagi sebagian pemilih Ross Perot merepresentasikan seorang kandidat di luar *mainstream* dan terlihat sebagai seorang yang akan melakukan sesuatu yang berbeda dan unik dari tradisi politik. *Epistemic issues* ini sangat mungkin muncul di tengah-tengah ketidakpercayaan publik kepada institusi-institusi politik yang menjadi bagian dari sistem yang berjalan.

Pada dasarnya keempat pendekatan perilaku pemilih tersebut diatas saling menguatkan atau melengkapi satu sama lainnya. Untuk memudahkan kepentingan praktis, kita dapat menyederhanakan keempat pendekatan itu menjadi sebuah rangkuman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih yang mempengaruhi perolehan suara parpol dalam pemilu, yaitu:²⁵

1. *Social image* atau citra sosial (pengalaman sosial)

3. Kandidat:
 - a. *Emotional feeling*
 - b. *Candidate personality*
4. Isu dan kebijakan politik (*issues and policies*)
5. Peristiwa-peristiwa tertentu:
 - a. Peristiwa mutakhir (*current events*)
 - b. Peristiwa personal (*personal events*)
6. Faktor-faktor epistemik (*epistemic issues*).

Berbeda dengan konteks yang terjadi di Indonesia selama tiga dekade kepemimpinan yang ada (orde lama, orde baru, dan reformasi). Perilaku pemilih dalam pemilu lebih terlihat secara murni ketika reformasi bergulir pada tahun 1998 untuk pemilu 1999. Karena, menurut Menurut William Liddle (1998), sebelum era reformasi, demokrasi hanya berkembang selama tujuh tahun (1949-1956). Afan Gaffar (1992) menyatakan proses politik di bawah Orde Baru bukanlah demokrasi, karena pemilu hanya bertujuan memperoleh legitimasi pemerintah untuk menata irama politik dan ekonomi. Sementara itu, menurut Irwan dan Endriana (1995), beberapa pelaksanaan Pemilu ditandai dengan terjadinya penyimpangan sehingga asas langsung, umum, bebas, dan rahasia tidak berjalan sebagaimana mestinya, hingga boleh disebut tidak memenuhi syarat demokrasi.

Setelah reformasi bergulir, keadaanpun menjadi berubah. Salah satu perubahan tersebut ditunjukkan pada saat Pemilu 1999 dengan

terlahirnya 48 parpol yang mengikuti pemilu dan partai-partai pun bebas menentukan platform politiknya masing-masing. Seiring dengan hal tersebut, terjadi pula perubahan perilaku komunikasi massa dan komunikasi interpersonal yang jauh lebih bebas dibandingkan sebelumnya.

Ada tiga masalah dalam menciptakan peta umum perilaku pemilih Indonesia pasca Orde Baru yang nantinya akan berguna untuk menyusun strategi *marketing* dalam memenangkan pemilu, baik ditingkat legislatif maupun eksekutif. Ketiga masalah tersebut, diantaranya;²⁶

1. Iklim sosial politik dewasa ini sangat berbeda dengan sebelumnya.

Dengan demikian, kita tidak bisa begitu saja berasumsi bahwa pola perilaku saat ini identik dengan masa silam.

2. Indonesia memiliki wilayah geografis yang luas dan majemuknya faktor sosio kultural, sosio ekonomi, tingkat pendidikan, dan tingkat modernisasi. Dengan kondisi seperti itu, cukup sulit membuat model perilaku umum, terlebih karena terbatasnya jumlah penelitian yang dilakukan..

3. Berbagai studi yang ada baru menghasilkan kesimpulan yang terlalu "kasar" sehingga perlu dirinci lebih detail agar dapat diterapkan untuk menyusun strategi pemenangan

Sedangkan perilaku pemilih Indonesia pada pemilu sebelum reformasi atau bisa dikatakan pada masa silam, lebih berorientasi pada;

1. Orientasi Agama
2. Faktor Kelas Sosial dan Kelompok Sosial Lainnya; Menurut Affan Gafar, ada empat faktor penyebab ketidak munculan faktor kelas dipedesaan jawa, yaitu;
 - a. Sifat sistem ekonomi (agraris subsisten) tidak memungkinkan kesadaran massa berdasarkan kelas.
 - b. Setelah penghapusan PKI dan pengebiran partai politik, penduduk desa terdepolitisasi.
 - c. Adanya trauma kup G-30 S. Ribuan anggota partai komunis dibunuh, termasuk anggota Barisan Tani Indonesia di pedesaan Jawa.
 - d. Pemerintahan orba yang tak henti-hentinya menjelaskan bahwa individu maupun organisasi tidak diizinkan menonjolkan antagonisme dari perbedaan agama, ras, dan kelas.
3. Faktor Kepemimpinan dan Ketokohan
4. Faktor Identifikasi
5. Orientasi Isu
6. Orientasi Kandidat
7. Kaitan dengan Peristiwa
8. Rekonfigurasi Papan Catur Politik

E. Definisi Konseptual

- 1. Pemilu (Pemilihan Umum):** Pemilihan wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam jabatan politik yang dilaksanakan secara teratur, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- 2. Partai Politik:** Sebuah organisasi yang terdiri dari beberapa aktivis yang mempunyai orientasi dan cita-cita yang kurang lebih sama dan bertujuan untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan ideologi partainya melalui cara-cara konstitusional.
- 3. PAN (Partai Amanat Nasional):** Sebuah partai yang dideklarasikan pada hari Minggu, 23 Agustus 1998 pukul 10.00 WIB, dengan kibaran matahari putih diatas dasar biru di Istora Senayan (sekarang Gelora Bung Karno). Ber lambang Matahari dengan sebuah arti "*Matahari itu simbol harapan baru setiap pagi dan siap menerangi seluruh alam.*"
- 4. Pemilih:** Seseorang yang memiliki hak pilih sebagai peserta dalam pemilu (pemilihan umum).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diamati²⁷.

Pemahaman serupa juga diungkapkan oleh Hadari Nawawi²⁸ yang menyatakan bahwa penelitian deskriptif pada dasarnya digunakan untuk menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek dan atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya. Penelitian ini akan menggambarkan dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan suara Partai Amanat Nasional di DIY pada pemilu 2004 yang lalu.

Studi kasus ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa PAN memiliki keunikan tersendiri sebagai partai yang terlahir dari rahim reformasi yang dipelopori oleh Amien Rais. Selain itu, besarnya peran serta Muhammadiyah dalam proses kelahiran partai tersebut, bahkan Amien Rais sebagai pendiri partai sekaligus ketua umum partai adalah seorang ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah saat itu, direlakan untuk memimpin PAN untuk pertama kalinya. Sehingga PAN mendapatkan dukungan yang cukup besar dari Muhammadiyah ketika pemilu 1999 dan pemilu 2004 kemarin dengan dicalonkannya Amien Rais sebagai calon presiden dari PAN.

2. Unit Analisis

Unit analisa dalam penelitian ini adalah partai politik sebagai sebuah institusi politik, dalam hal ini DPW PAN DIY. Para pengurus maupun kader partai PAN di DIY menjadi sumber data dalam penelitian

ini melalui wawancara (*interview*) dan DPW PAN DIY sendiri sebagai sumber data dalam bentuk dokumentasi.

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang diperoleh dengan teknik wawancara dan data sekunder yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Wawancara atau *interview* merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden atau sumber informasi.

Dalam penelitian ini ada beberapa responden yang kami perlukan guna mendapat informasi tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perolehan suara PAN di DIY pada pemilu 2004. Adapun responden yang kami wawancarai untuk mendapatkan data primer tersebut, yaitu:

TABEL 1.5
DAFTAR RESPONDEN WAWANCARA (INTERVIEW)

NO.	Jenis Responden	Jumlah
1.	Kader DPC PAN Umbulharjo	1 orang
2.	Tim Sukses PAN pemilu 2004	2 orang
3.	Tokoh Masyarakat	1 orang
4.	Anggota DPRD DIY fraksi PAN	2 orang
5.	Pengurus DPW PAN DIY	2 orang
6.	Caleg PAN pemilu 2009	2 orang
Jumlah 10 orang		10 Responden

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif. Menurut Patton, yaitu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar²⁹.

Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Kemudian dilakukan reduksi data dengan jalan membuat abstraksi. Langkah selanjutnya adalah menyusun data dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu kemudian dikategorisasikan. Tahap terakhir adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah tahap ini selesai, maka baru dilakukan penafsiran data³⁰. Sehingga tahap-tahap dalam teknik analisa data kualitatif meliputi: pemrosesan satuan data, reduksi data, pengkategorisasian data termasuk pemeriksaan